

## **Bab II**

### **Korea Selatan dan Diplomasi Kebudayaan Korea Selatan**

Pada Bab II ini, penulis mencoba menjelaskan tentang negara Korea Selatan, yaitu tentang sejarah kelahiran Korea Selatan, politik luar negeri yang dimiliki Korea Selatan, dan penerapan diplomasi budaya Korea Selatan. Korea Selatan memiliki ciri khas yang begitu menarik dan berbeda dengan negara lain, keunikan yang dimiliki Korea Selatan ini adalah Korea Selatan ini negara yang mampu melestarikan warisan sejarah dan leluhurnya. Bagi masyarakat Korea Selatan asset yang berharga yaitu keanekaragaman dan keunikan yang dimiliki Korea Selatan ini. Dalam hal ini Korea Selatan menggunakan keunikan dan keanekaragaman untuk berhubungan baik dengan negara-negara yang ada didunia dengan cara berdiplomasi, mendiplomasikan budaya-budayanya, menyebarkan keunikan dan keanekaragaman yang dimiliki Korea Selatan ini dan mencampurkan hal-hal yang berkaitan dengan modernisasi agar tetap mengikuti era global saat ini.

#### **A. Sejarah Korea Selatan**

Letak wilayah Semenanjung Korea yang sangat strategis, di wilayah Asia Timur diantara Daratan Cina dan Kepulauan Jepang, menyebabkan Korea Selatan memainkan peran penting dalam membentuk dan mempertahankan keseimbangan kekuatan di daerah tersebut. Selama berabad-abad Korea Selatan berperan sebagai jembatan kultural antara Cina dan Jepang, serta pintu masuk bagi Cina, Rusia, Jepang dan Amerika Serikat.

Korea Selatan mempunyai bentuk negara Republik dalam hal ini ada 3 pembagian kekuatan dalam 3 lembaga, yaitu eksekutif, legislative, dan yudikatif. Lembaga eksekutif Korea Selatan dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam hal legislative, Korea Selatan memiliki *Unicameral National Assembly* yang dipilih setiap 4 tahun sekali dan terakhir diselenggarakan pada April 2012. Dan dalam Yudikatif, Korea Selatan memiliki *Supreme Court* dan *Banding Constitutional Court* (Allafta, 2016).

Korea Selatan menganut ideologi negara demokrasi, yakni anggota masyarakat mempunyai kebebasan berbicara, kebebasan agama dan kebebasan pers. Pemerintah juga hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Pembahasan tentang ideology Korea Selatan tentu tidak terlepas dari bahasan tentang Presiden yang pernah menjabat di Korea Selatan (Allafta, 2016).

Sebelum menjadi negara maju, Korea Selatan pernah menjadi negara miskin di dunia setelah berbagai hal yang terjadi di Korea. Selama 35 tahun Jepang menjajah Korea, selama itu pula Korea mengalami penindasan yang cukup kejam. Sebelum dijajah Jepang, Korea dipimpin oleh raja, akan tetapi selama di jajah Jepang memimpin Korea dengan segala penindasan terhadap masyarakat Korea.

Tujuan Jepang membangun Pemerintah Penjajahan Jepang di Korea pada saat itu adalah ingin menjadikan Semenanjung Korea sebagai bagian dari Jepang, sehingga pada saat itu bahkan masyarakat dilarang untuk

menggunakan bahasa *Hangeul* atau huruf korea, bahkan bahasa Korea pun tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam berbicara sehari-hari. Selama Perang Dunia II tentara Jepang juga banyak mengeksploitsi sumbe daya Korea, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Penjajahan Jepang juga secara bersamaan mulai menguasai kaum feodal Korea, dan memasukan nilai-nilai kapitalisme dalam tradisi masyarakat Korea. Hal ini dilakukan dalam rangka menyebarkan modernisasi. Pada saat itu modal yang digunakan untuk melakukan modernisasi diwilayah jajahannya tersebut didapatkan dari hasil penanaman modal Jepang di Korea (Mas'oed & Seung-Yoon, 2010).

Jepang menggunakan cara yang cukup keji dalam menguasai tanah-tanah milik masyarakat Korea untuk bisa menjadi milik Jepang dengan membentuk Biro Agraria untuk mengurus perampasan hak tanak secara efektif untuk memperluas wilayah kepemilikan Jepang d Korea yang hasilnya 40% wilayah Korea sudah dikuasai oleh Jepang dengan termasuk cadangan makanan penduduk Kore. Masyarakat Korea yang tanahnya dirampas oleh Jepang kemudian dijadikan kuli, buruh, atau pengembara. Selain itu, Jepang juga melakukan campur tangan ke sector industry, pertambangan, transportasi, dan pendidikan.

Penjajah Jepang juga secara bersamaan mulai menguasai kaum feodal Korea, dan memasukkan nilai-nilai kapitalisme dalam tradisi Korea. Hal ni dilakukan dalam rangka menyebarkan modernisasi. Pada saat tu modal yang digunakan untuk melakukan modernisasi di wilayah jajahannya tersebut

didapatkan dari peneranaman modal Jepang di Korea (Mas'ood & Seung-Yoon, 2010).

Setelah Jepang menguasai perekonomian di Korea secara utuh, secara perlahan Jepang mulai menghancurkan tatanam kehidupan masyarakat kehidupan masyarakat Korea. Pada saat itu Jepang memulai strateginya untuk menguasai seluruh wilayah Semenanjung Korea dan memasukkan struktur masyarakat Korea ke dalam Struktur masyarakat Jepang. Dan untuk menjaga kepentingan kekuasaan di wilayah Semenanjung Korea tersebut, Jepang harus berperang melawan Rusia dan Cina yang ingin menjatuhkan kekuasaan Jepang di wilayah tersebut (Mas'ood & Seung-Yoon, 2010).

Akibat dari kekejaman Jepang di Korea tersebut membuat beberapa masyarakat Korea lebih memilih untuk bermigrasi keluar negeri dan meninggalkan bangsa mereka. Meskipun bermigrasi keluar negeri, masyarakat Korea tetap mendirikan perkampungan Korea, karena masyarakat Korea ingin tetap memelihara dan melestarikan tradisi-tradisi yang dimiliki Korea, selain itu masyarakat yang bermigrasi mempersiapkan pasukan kemerdekaan dan mendukung semua gerakan kemerdekaan.

Tepat pada tahun 1945 Korea memproklamasikan kemerdekaannya menjadi negara yang merdeka, tapi kegembiraan bangsa Korea atas kemerdekaannya itu tidak bertahan lama karena bangsa Korea harus menghadapi suatu tragedi pemisahan bangsa dan tanah air. Pemisahan itu terjadi setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang memainkan peran penting dalam mengalahkan Imperialis Jepang, masuk ke Semenanjung Korea

dan masing-masing menduduki daerah bagian selatan dan utara Semenanjung Korea yang dibagi tepat pada garis lintang utara 38 derajat.

Untuk sementara, kedua bagian Korea masing-masing berada di bawah kepemimpinan US dan AS. Dibelahan utara Semenanjung Korea, US memberikan dukungan mereka kepada Kim Il-Sung untuk menjalankan pemerintahannya atas Korea Utara. Pemerintahan Kim Il-Sung dijalankan dengan didasarkan pada pemikiran komunis. Dibelahan lain Semenanjung Korea, AS memilih Rhee Syngman sebagai pemimpin Korea selatan. Pada tahun 1946, saat Kim Il-Sung membentuk Komite Rakyat Sementara di belahan utara Semenanjung Korea dengan dukungan US, pada saat itu juga Rhee Syngman tengah mempersiapkan pembentukan Dewan Perwakilan Demokrasi dibelahan Selatan semenanjung Korea (Seung-Yoon & Nur Aini, Sejarah Korea Sejak Awal Abad Hingga Masa Kontemporer, 2003).

Memiliki dua kubu yang berbeda dengan satu badan membuat Korea menjadi bergesekan dan semakin lama akhirnya muncullah Perang Korea atau Perang Saudara yang meledak pada tahun 1950. Pada awal masuknya Uni Soviet ke Semenanjung Korea sebenarnya telah menolak bergabungnya kedua Korea menjadi satu utuh yang sebelumnya diupayakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kemudian juga ditolak oleh Republik Rakyat Demokrasi di utara dan Republik Korea di Selatan di tahun 1948.

Pada tahun 1950 Korea Utara mulai mengerahkan angkatan bersenjata yang dibantu oleh Uni Soviet untuk menyerang Korea Selatan. Karena Korea Selatan tidak menduga sama sekali bahwa Korea Utara akan mengadakan

serangan militer ke wilayahnya. Korea Selatan tidak memiliki rencana atisipasi sehingga harus undur dan meninggalkan ibukota Seoul. PBB segera mencap Korea Utara sebagai agresor sehingga PBB segera mengirimkan pasukannya yang terdiri dari pasukan 16 negara untuk membantu Korea Selatan menghadapi serangan Korea Utara.

Setelah 3 tahun terlibat peperangan yang sangat sengit, kedua Korea akhirnya bersedia untuk menandatangani perjanjian gencaran senjata pada tahun 1953 dan sekaligus mengakhiri Perang Korea. Walaupun Perang Korea hanya berlangsung selama 3 tahun, namun perang tersebut membawa begitu banyak kesengsaraan rakyat Korea. Banyak orang yang tewas di medan perang dan sejumlah besar rumah, pabrik dan harta benda yang lain hancur. Yang lebih penting lagi, Perang Korea telah menyebabkan masyarakat kedua Korea menjadi saling mencurigai satu sama lain dan rasa ketidakpercayaan itu tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat.

Dalam menjalankan jabatannya sebagai presiden pertama Korea Selatan, Rhee syngman menanamkan pengaruhnya dengan sangat kuat dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Salah satu alat yang digunakan oleh Rhee Syngman untuk memerintah Korea secara diktator adalah UU Keamanan Nasional yang disetujui oleh Dewan Nasional pada tahun 1948. Pada mulanya UU ini dikeluarkan sehubungan dengan adanya ancaman komunisme dari Korea Utara. UU ini dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh suatu pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan represif.

Kecurangan politik yang dilakukan Rhee Syngman selama masa pemerintahannya mendorong mahasiswa Korea untuk mengadakan demonstrasi pada tanggal 18 April 1960. Demonstrasi itu berlanjut keesokan harinya sekitar 30.000 orang peajar dan mahasiswa Korea bergerak menuju istanah kepresidean dan menyelenggarakan demonstrasinya disana. Pada tanggal 25 April 1960, sekitar 300 orang dosen universitas juga melakukan demonstrasi sebagai bentuk dukungan bagi aksi mahasiswa. Gerakan-gerakan itu berhasil memaksa Rhee Syngmn untuk mundur dari kursi kepresidenan dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada mentresi luar negeri Korea, Ho Chong. Tampuk kekuasaan itu diberikan kepada menteri luar negeri karena wakil presiden Korea, Chang Myo, telah mengundurkan diri sebagai aksi protes terhadap pemilihan umum pada tanggal 15 Maret (Seung-Yoon & Nur Aini, Sejarah Korea Sejak Awal Abad Hingga Masa Kontemporer, 2003).

Tahun 1961, Park Chung Hee yang kemudan menjadi Presiden ke-3 di Korea Selatan, Park Chung Hee dapat meningkatkan sector industry dan peningkatan ekonomi Korea, karena pada masa tersebut ekonomi Korea belum stail dan masih bermasalah dengan sikap pemerintah yang otoriter, oleh karena itu Park tidak terlalu fokus dengan demokrasi. Tujuan dari sikapnya ini yaitu monlisasi ekonomi Korea Selatan dapat mendukung rezimnya karena ancaman dari Korea Utara yang digunakan Park Chung Hee sebagai pembenaran dari metodenya.

Di tahun 1979, ketidakpuasan atas rezim Park Chun Hee ini mulai muncul di kalangan masyarakat, aturan-aturan yang otoriter mulai mencapai

titik dimana kerusakan meluar di berbagai titik di Korea Selatan. Park kemudian memperkuat kendalinya dengan mengeluarkan Kim Young Sam dari majelis nasional yang sebelumnya Kim Young Sam telah terpilih sebagai ketua dari Partai Demokrasi Baru. Kim Young Sam dianggap telah mengajukan banding ke Amerika Serikat untuk menarik dukungan kepada rezim otoriter Park. Beberapa hari kemudian pada tanggal 26 Oktober 1979 sebuah kejadian terjadi di Cheong Wa Dae, dimana Presiden Park dibunuh oleh direktur Badan Intelejen Pusat Korea yang motif dari pembunuhan tersebut ialah bahwa ia ingin mengakhiri system *Yushin*, semakin meruncingnya konflik politik yang terjadi dan pemulihan demokrasi. *Yushin* sendiri merupakan arti dari perbaikan peraturn dan system lama secara sempurna. Inti dari system politik *Yushin* ialah keunggulan presiden atas tiga badan kenegaraan. Politik *Yushin* ini digunakan dengan alasan untuk mengembangkan negara dan bangsa dalam industrialisasi dan modernisasi (Mas'oed & Sung-Yoon, 2003).

Jendral Chun Doo Hwan selaku kepala Badan Inteleje Militer Korea, menggunakan kesempatan ini untuk merebut kekuasaan pemerintah di Korea Selatan, sehingga Chun dapat menguasaikekuatan politik Korea yang ada. Chun akhirnya terpilih sebagai Presiden Korea Selatan dengan menyalahgunakan undang-undang yang baru agar dapat menjadi Presiden Korea. Dengan demikian Chun memegang kekuatan politik Korea meskipun ada banya tantangan dari dalam maupu luar negeri. Dan chun berhasil memimpin Korea Selatan selama 7 tahun.



Dengan masih menggunakan system pemerintahan *Yushin* sehingga system dan karakteristik pemerintah Chun sama dengan pemerintahan sebelumnya. Selama masa pemerintah Chun, kelompok militer menguasai seluruh bidang kenegaraan, seperti ekonomi, politik, sosial, maupun bidang-bidang kenegaraan lain. Dengan menggunakan kelompok militer yang menguasai bidang kenegaraan membuat Chun menjadi pemerintahan yang lebih kuat dari pemerintahan yang sebelumnya karena di pemerintahan yang sebelumnya kelompok militer hanya digunakan sebagai basis dukungan politik. Pada masa ini kaum teknokrat elit juga sangat diutamakan, karena untuk melancarkan pembangunan industrialisasi di seluruh bidang ekonomi Korea pemerintah membutuhkan bantuan dari teknokrat politik tersebut.

Meskipun menjalankan kebijakan yang sama dengan Park Chng-Hee, legitimasi dan dukungan yang diperoleh Chun tidak sebesar legitimasi dan dukungan rakyat kepada Park Chung-Hee. Hal ini disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, rakyat Korea tidak menyukai profil Chun Doo-Hwan dan keluarganya. Alasan yang kedua yaitu bahwa Chun Doo-Hwan melakukan kudeta berdarah yang menyebabkan kematian ratusan orang warga Korea. Kemudian yang ketiga adalah karena Chun Doo-Hwan terlalu menitikberatkan kebijakan ekonomi dibandingkan kebijakan bidang politik.

Terpilihnya Presiden Roh Tae-Woo sebagai Presiden Korea Selatan ini membawa beberapa arti penting bagi Korea Selatan. Pertama, dimana kekuatan politik memiliki sifat yang adi dan juga berhasil dukungan rakyat. Kedua, badan legislative dan yudikatif diperkuat, dengan demikian system

pemerintah yang terdiri dari tiga badan akan berjalan secara seimbang. ketiga, otonomi pemerintahan lokal mulai dihidupkan, kalangan pers dan kegiatan perburuhan juga dimulai kembali. Dengan kepemimpinan presiden Roh ini berusaha untuk menghapus peran militer sambil mencoba mengembangkan pemerintahan sipil.

Kemudian di pemerintahan Presiden Kim Young Sam, masa pemerintahan militer di Korea diakhiri dan mengawali masa demokrasi Korea. Presiden Kim mengganti system politik Korea secara total dari system kekuatan militer menjadi kekuatan sipil. Pemerintahan Kim yang sebelumnya ingin menyempurnakan dan konsolidasi di Korea sedang berjalan, namun pada kenyataannya selama 5 tahun masa pemerintahanya, yang terjadi merupakan masa persiapan untuk menyempurnakan demokratisasi Korea. Karena konsolidasi demokrasi tidak dapat terjadi tanpa adanya reformasi secara total.

## **B. Politik Luar Negeri Korea Selatan**

Korea Selatan mengalami dinamika perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu dalam menerapkan politik luar negerinya. Perubahan yang terjadi disebabkan adanya kepentingan nasional yang berbeda disetiap pergantian pemerintah di Korea Selatan. Politik luar negeri Korea Selatan dapat digambarkan dengan dua periode. Pertama politik luar negeri periode masa pemerintahan otoriter (1948-1987). Kemudian yang kedua politik luar negeri masa pemerintah sipil (1992-sekarang).

Pada masa Park Geun-Hye sebagai Presiden wanita pertama Korea Selatan pada tahun 2013-2016. Park Geun-Hye mengusung kebijakan luar negeri *Trust-Politik Policy*. *Trust-Politik Policy* adalah tentang bagaimana membangun kepercayaan sebagai cara mempromosikan kerjasama institusional pada level yang lebih tinggi dan kolaborasi yang diharapkan kedepannya bisa mencapai level bangsa antar kawasan ((MOFA), 2013). Hal tersebut sesuai dengan pidato Park Geun-Hye:

*The "era of happiness for the people" that I dream of is one that ushers in an era of happiness on the Korean Peninsula and indeed throughout the global village. We will build even more solid ties of trust with the United States, China, Japan, Russia and other countries of Asia and Oceania by reducing tension and conflict to build peace and cooperation in Asia ((MOFA), 2013).*

Dalam pidato tersebut, Park Geun-Hye ingin mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakat Korea Selatan dan masyarakat global. Hal ini Park ingi membangu hubungan dengan kepercayaan seperti dengan Amerika Serikat, China, Jepang, Rusia dan berbagai negara di Asia dan Ocenia dengan menurunkan tensi konflik yang ada agar bisa membangun perdamaian dan kerja sama di Asia maupun dunia.

Dalam keijakan *Trust-Politik* sangat mengedepankan konsep "trust" dalam setiap proes yang akan dijalankan. Menurut Park *Trust* merupakan

sebuah inti nilai terhadap keseluruhan filosofi politik yang menjadi asset yang dibutuhkan dalam membantu pengembangan kerja sama tidak hanya antar individu tapi juga antar bangsa. Selain sebagai asset dan sarana umum untuk kerja sama internasional serta sebagai unsur yang sangat diperlukan dalam menciptakan perdamaian yang nyata (Byung-se, 2013).

Dalam kebijakan luar negeri “*Trust-Politik Policy*” Korea Selatan terdiri atas tiga kerangka yaitu, *Trust-build Process on the Korean Peninsula*, *Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative* dan *Eurasia Initiative* ((MOFA), 2013). Yang pertama, *Trust-Building Process on the Korean Peninsula* merupakan sebuah cara membangun suatu kepercayaan antara Korea Selatan dan Korea Utara dan pergerakan hubungan antar Korea dengan didasari keamanan yang kuat.

Kemudian kerangka yang kedua adalah, *Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative* (NAPCI) yang memiliki tujuan untuk membangun sebuah kepercayaan antar bangsa di Asia Timur Laut dengan memperkuat kebiasaan untuk dialog dan kerjasama dengan mengedepankan isu-isu non traditional kemudian secara bertahap pada pengembangan kerjasama ((MOFA), 2013). Kerangka yang ketiga yaitu *Eurasia Initiative* dimana Korea Selatan berinisiatif kerjasama dan strategi nasional demi mencapai kemakmuran berkelanjutan dan perdamaian di Eurasia (Eropa dan Asia) ((MOFA), 2013).

### **C. Diplomasi Budaya Korea Selatan**

Diplomasi budaya menjadi suatu soft power bagi negara Korea Selatan, dimana Korea Selatan memiliki kekuatan politik yang dipengaruhi oleh adat-istiadat dan kebiasaan, budaya, nilai-nilai, moral, ide, gagasan, pengaruh sosial dan lingkungan. Diplomasi budaya Korea Selatan memiliki tujuan untuk menyebarkan budayanya ke negara lain, dengan ada K-pop, K-drama, dan budaya-budaya yang selalu ditunjukkan dari Korea Selatan.

Dalam *Principal Goals and Direction of Korea Culture Diplomacy*, ada dua hal yang mejadi sasaran dari kebijakan diplomasi kebudayaan yaitu ((MOFA), 2007). Yang pertama mendorong kerjasama dengan negara-negara lain melalui pertukaran budaya seperti mendukung berbagai program exchange yang dilaksanakan baik oleh pemerintah dan non pemerintah yang akan membuat fondasi yang kuat dalam kerjasama Korea dengan negara-negara lain. Kedua, meningkatkan daya saing nasional melalui peningkatan citra nasional.

Didalam buku *Hallyu As a Strategic Marketing Key in the Korean Media Content Industry* di era globalisasi yang ditunjang kemajuan teknologi dan peran industry kreatif juga sangat memungkinkan pengembangan soft diplomasi apalagi Korea Selatan termasuk negara yang terdepan dalam revolusi digital yang memiliki daya akses internet. Melalui koneksi jaringan internet tersebut dapat mendukung peyebaran budaya yang dimiliki Korea ke berbagai negara dan hal ini bagian dari pelaksanaan soft diplomasi Korea Selatan (Chung & Tae Jun, 2011).

Dalam hubungan diplomasi budaya menunjukkan kegiatan budaya yang diintegrasikan ke dalam kebijakan politik luar negeri. Diplomasi kebudayaan juga harus didukung dengan kekuatan ekonomi, politik, dan militer. Penyebaran pengaruh budaya Korea bukan hanya meningkatkan peluas untuk melaksanakan pertukaran budaya saja, tetapi juga akan meningkatkan interaksi budaya antara Korea dengan berbagai bangsa diseluruh dunia. Dalam hal ini kelanjutan penyearan pengaruh budaya Korea, juga sngat berate terhadap pengembangan aset budaya Asia.